

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN

A. Kondisi Umum Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis $2^{\circ}08'$ LU serta $3^{\circ}02'$ LS serta di antara $108^{\circ}30'$ BT dan $114^{\circ}10'$ BT pada peta Bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik tersebut maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepat di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak tersebut maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah daratan berdataran rendah dengan luas 146.807 km^2 atau 7,53% dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Barat memiliki 14 Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Singkawang.

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan sebesar 62,58%, yang terdiri dari hutan belukar, hutan lebat, dan hutan sejenis. Sementara itu areal

perkebunan mencapai 2.469.389 ha atau 16,82%. Dari 14,68 juta ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,31%.

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Barat

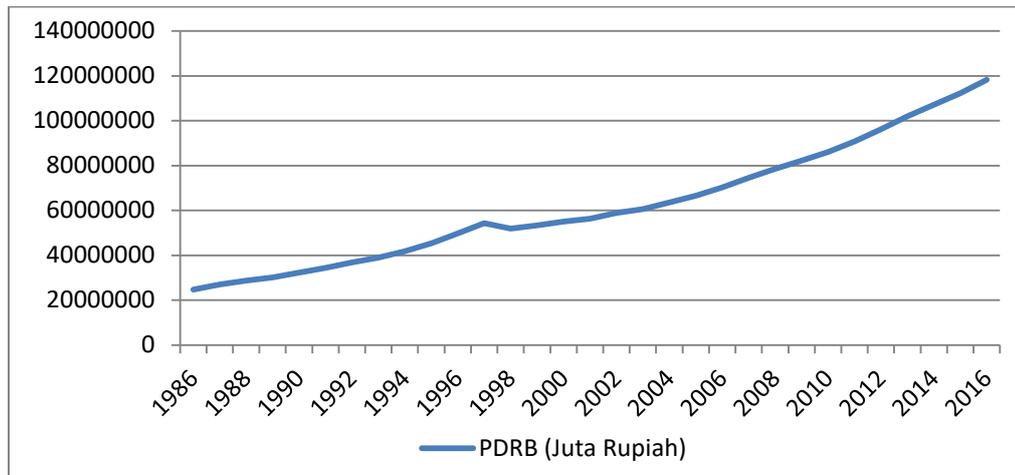
Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat selalu mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi di wilayahnya selalu menunjukkan *progress* yang meningkat setiap tahunnya. Indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dapat ditunjukkan dengan nilai PDRB di daerah tersebut. Oleh karena itu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selalu mengatur strategi dalam bentuk kebijakan agar kestabilan perekonomian daerah selalu terjaga dengan baik. Hal tersebut pada umumnya tercermin dari nilai PDRB yang selalu memberikan peningkatan secara signifikan yang mana dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah. Keinginan untuk mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi yang baik tidak selamanya berjalan dengan mudah disetiap tahunnya, namun Provinsi Kalimantan Barat terbukti berhasil dalam meningkatkan pertumbuhannya yang dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB dari tahun ke tahun.

TABEL 4.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986-2016

TAHUN	PDRB (Juta Rupiah)	TAHUN	PDRB (Juta Rupiah)
1986	24698580	2002	58860718
1987	26991625	2003	60662857
1988	28797996	2004	63569412
1989	30155125	2005	66546697
1990	32296969	2006	70286937
1991	34452601	2007	74521663
1992	36866473	2008	78559608
1993	38919400	2009	82300545
1994	41853813	2010	86065854
1995	45453341	2011	90797590
1996	49763618	2012	96161928
1997	54384855	2013	101980339
1998	51990359	2014	107113786
1999	53418481	2015	112261168
2000	54992517	2016	118184632
2001	56297049		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (diolah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (diolah)

GRAFIK 4.1

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986-2016 (Juta Rupiah)

Sajian data di atas menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 31 tahun PDRB Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 1998 tercatat adanya penurunan PDRB sebesar 4% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 51.990.359 Juta Rupiah. Angka tersebut tercatat lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 1997 sebesar 54.384.855 Juta Rupiah. Penurunan angka PDRB Provinsi Kalimantan Barat tahun 1998 dikarenakan adanya krisis moneter yang terjadi pada era tersebut. Namun di tahun selanjutnya yakni tahun 1999, PDRB meningkat kembali dan menunjukkan *trend* peningkatan yang positif hingga tahun 2016.

2. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Kalimantan Barat

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1968, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.

Perkembangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat tidak lepas dari peranan perkembangan investasi di dalamnya. Dalam upaya mengembangkan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berkemajuan maka perlu kiranya dilakukan perluasan investasi sebagai faktor pendukung dalam hal tersebut. Nilai penanaman modal dalam negeri Provinsi Kalimantan Barat tercatat di dalam besarnya realisasi investasi dari proyek penanaman modal dalam negeri yang telah disetujui pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

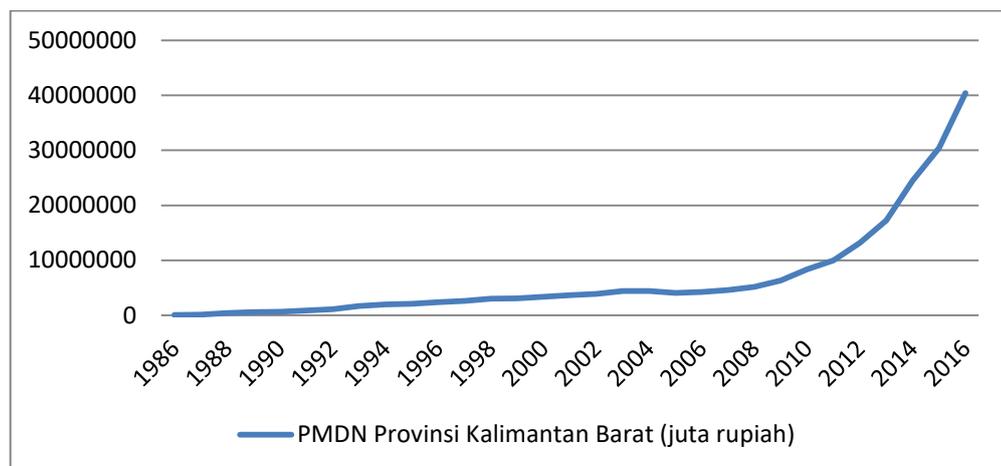
TABEL 4.2

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 1986-2016

Tahun	PMDN (Juta Rupiah)	Tahun	PMDN (Juta Rupiah)
1986	84581	2002	3871001
1987	106279	2003	4411370
1988	409895	2004	4437965
1989	566236	2005	4096567
1990	661591	2006	4256212
1991	882715	2007	4579583
1992	1129266	2008	5201255
1993	1719405	2009	6339180
1994	1984511	2010	8381742
1995	2106779	2011	10004669
1996	2370619	2012	13177576
1997	2619652	2013	17266077
1998	3020296	2014	24474623
1999	3103129	2015	30420152
2000	3395910	2016	40383786
2001	3681354		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Tabel 4.2 menunjukkan nilai realisasi penanaman modal dalam negeri Provinsi Kalimantan Barat selama periode tahun 1986 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2005 sedikit mengalami penurunan sebesar 4.096.567 juta rupiah dari tahun sebelumnya yakni tahun 2004 sebesar 4.437.965 juta rupiah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (diolah)

GRAFIK 4.2

Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986-2016 (Juta Rupiah)

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sentimen positif investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan respon yang begitu baik dan terus mengalami peningkatan hingga ke tahun 2016. Pada tahun 2016 nilai PMDN Kalimantan Barat meyeentuh angka 40.383.786 juta rupiah.

3. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran investasi sektor swasta pada dasarnya tidak hanya pada penanaman modal dalam negeri, tetapi juga melalui penanaman modal asing. Penanaman modal asing (PMA) merupakan alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Nilai

penanaman modal asing Provinsi Kalimantan Barat tercatat di dalam besarnya realisasi investasi dari proyek penanaman modal asing yang telah disetujui pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

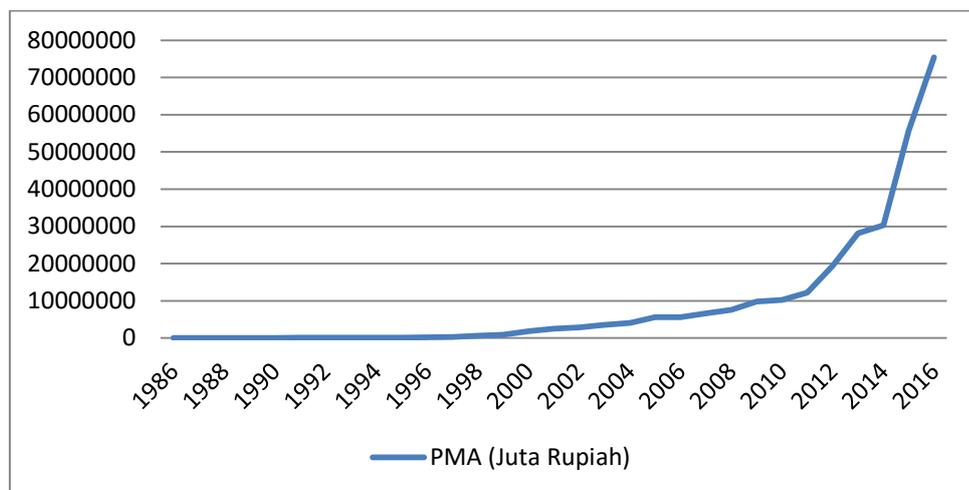
TABEL 4.3

Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 1986-2016

Tahun	PMA (Juta Rupiah)	Tahun	PMA (Juta Rupiah)
1986	8438	2002	2851082
1987	10128	2003	3545991
1988	16538	2004	4023741
1989	62827	2005	5633475
1990	73008	2006	5605522
1991	88740	2007	6627638
1992	98448	2008	7611365
1993	99109	2009	9813786
1994	108476	2010	10199052
1995	122280	2011	12205479
1996	172091	2012	19390833
1997	335228	2013	28194885
1998	644135	2014	30340629
1999	884419	2015	55583763
2000	1829085	2016	75430409
2001	2496978		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Tabel 4.3 menunjukkan nilai realisasi proyek PMA Provinsi Kalimantan Barat yang telah disetujui oleh pemerintah setempat. Data menunjukkan bahwa nilai PMA cenderung memberikan respon yang positif dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa tahun 2016 nilai investasi PMA mencapai angka 75.430.409 juta rupiah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (diolah)

GRAFIK 4.3

Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986-2016 (Juta Rupiah)

Grafik 4.3 menjelaskan bahwa perkembangan penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang periode tahun 1986 sampai tahun 2016 menunjukkan peningkatan terus menerus. Setelah melewati masa krisis, PMA di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan *trend* positif. Setelah masa krisis perkembangan PMA terus memberikan *trend* yang positif sampai tahun 2016 yang mencapai nilai penanaman modal asing hingga 75.430.409 juta rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi PMDN di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Perkembangan Luas Lahan Produktif di Provinsi Kalimantan Barat

Potensi sumber daya alam perlu ditingkatkan secara komprehensif agar mengalami peningkatan yang berarti. Pengelolaan sumber daya alam yang baik tentunya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya

dengan mengelola tanah menjadi lahan yang produktif. Dalam hal ini lahan produktif yang ada di Provinsi Kalimantan Barat diukur dari Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang merupakan lahan yang paling mendominasi dibandingkan lahan perkebunan lainnya. Perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan yang beroperasi secara konsisten di Provinsi Kalimantan Barat. Perkembangan ini dapat dinilai dari luas lahan perkebunan besar kelapa sawit sebagai berikut:

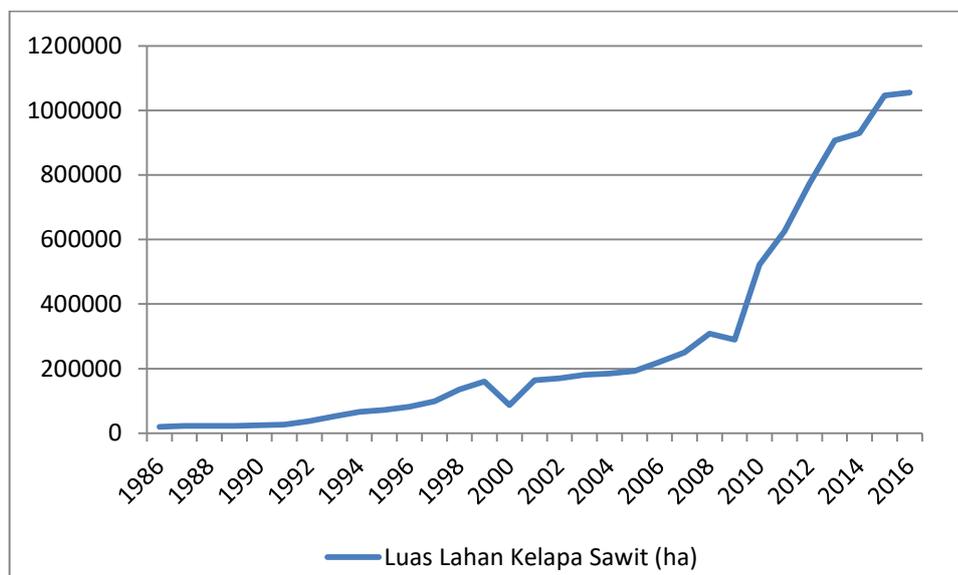
TABEL 4.4

Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986-2016

Tahun	Luas Sawit (Ha)	Tahun	Luas Sawit (Ha)
1986	19733	2002	170008
1987	22122	2003	180986
1988	22979	2004	184553
1989	22718	2005	192547
1990	24440	2006	220406
1991	26182	2007	250500
1992	37698	2008	308596
1993	52119	2009	289334
1994	66424	2010	522508
1995	71771	2011	625532
1996	81966	2012	773945
1997	98896	2013	906486
1998	135176	2014	929360
1999	160247	2015	1046212
2000	87131	2016	1055656
2001	163945		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Tabel 4.4 menunjukkan perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang periode 31 tahun yakni 1986 sampai dengan 2016. Dapat dilihat bahwa perkebunan kelapa sawit menunjukkan konsistensi terhadap perkembangannya. Setiap tahun lahan perkebunan kelapa sawit selalu mengalami perluasan sehingga perkebunan kelapa sawit memang disebut-sebut sebagai primadona di Kalimantan Barat. Hal tersebut dapat kita lihat juga dalam *trend* perkembangan kelapa sawit sepanjang tahun 1986 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (diolah)

GRAFIK 4.4

Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986-2016 (Ha)

Grafik 4.4 menunjukkan bahwa luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu memberikan *trend* yang positif selama periode 31 tahun. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa untuk komoditi kelapa sawit selama kurun waktu 2012-2016, luas tanaman tahun 2016 naik 0,9 persen dari tahun sebelumnya. Perluasan lahan

perkebunan kelapa sawit memang menunjukkan perkembangan yang baik, namun pada tahun 2000 tercatat bahwa luas lahan menyempit menjadi 87.131 hektar dibanding tahun sebelumnya yakni 1999 sebesar 160.247 hektar. Hal ini dikarenakan pada tahun 1999 harga jual kelapa sawit menurun, sehingga banyak pemilik kebun yang takut mengalami kerugian sehingga ada beberapa yang menghentikan kegiatan perkebunan dan ada sebagian yang menjual lahan perkebunan tersebut. Selain itu tahun 2008 ke tahun 2009 luas lahan kelapa sawit juga menurun dari 308.596 hektar menjadi 289.334 hektar. Namun selain tahun tersebut luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu mengalami perkembangan yang baik.

5. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat

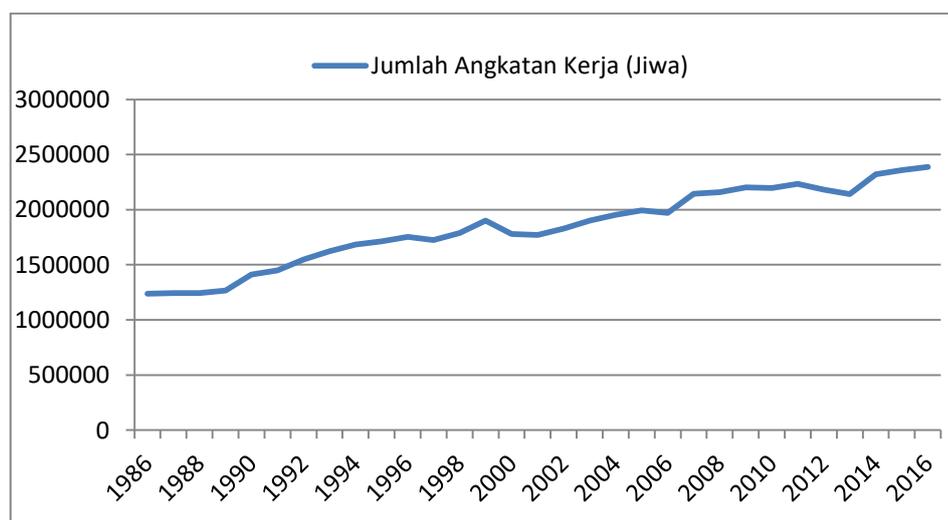
Pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya akan berpengaruh pada pertumbuhan angkatan kerja, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan memperbanyak jumlah angkatan kerja yang tersedia. Semakin besar angkatan kerja maka semakin banyak pula tenaga kerja yang produktif, sementara jumlah penduduk yang lebih besar dapat meningkatkan luasnya pasar dalam negeri. Perkembangan jumlah tenaga kerja dalam hal ini diukur dengan jumlah total angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat pada sajian data sebagai berikut:

TABEL 4.5

Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986-2016

Tahun	Angkatan Kerja	Tahun	Angkatan Kerja
1986	1237717	2002	1827278
1987	1243818	2003	1901757
1988	1243899	2004	1954343
1989	1267197	2005	1993428
1990	1411138	2006	1969298
1991	1450205	2007	2143823
1992	1549014	2008	2157549
1993	1621747	2009	2200895
1994	1682633	2010	2197325
1995	1713331	2011	2233195
1996	1752533	2012	2182524
1997	1725533	2013	2140166
1998	1787677	2014	2320229
1999	1901686	2015	2357224
2000	1778795	2016	2388758
2001	1771550		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (diolah)

GRAFIK 4.5

Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 1986-2016

Sajian data di atas dapat menjelaskan bahwa perkembangan jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat selalu berfluktuasi walaupun masih menunjukkan *trend* perkembangan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 1986 jumlah angkatan kerja Kalimantan Barat tercatat sebesar 1.237.717 jiwa dan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 2.388.758 jiwa. Pada dasarnya jumlah angkatan kerja yang bertambah akan memungkinkan Negara atau wilayah tersebut menambah produksi. Semakin banyak proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu dan akan mendorong kemajuan dalam pembangunan ekonomi.